

Konstruksi Identitas Politik Melalui Representasi Media Digital

Ocha Prisilia¹, Naillah Andita², Fuadi Dwitia Zikri³, Chairul Muchith⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Ocha Prisilia

E-mail: ochaprisilia605@gmail.com

Abstrak

Media digital telah menjadi arena utama dalam pembentukan politik representasi di era demokrasi kontemporer. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi politik, tetapi juga sebagai ruang produksi makna, identitas, dan realitas politik yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, simbol, serta logika algoritmik platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik representasi dikonstruksi melalui media digital serta implikasinya terhadap identitas politik, partisipasi publik, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah dan publikasi akademik yang relevan dengan tema politik representasi, media sosial, dan komunikasi politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik identitas dan populisme menjadi strategi representasi dominan di ruang digital, yang efektif dalam membangun loyalitas politik berbasis afeksi namun berpotensi memicu polarisasi sosial dan mereduksi diskursus kebijakan substantif. Media digital juga mendorong mediatization of politics, di mana performativitas simbolik dan citra personal lebih diutamakan dibandingkan argumentasi rasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kritis, literasi media, dan etika komunikasi politik untuk menjaga ruang publik digital yang inklusif dan demokratis.

Kata kunci - politik representasi, media digital, identitas politik, komunikasi politik, demokrasi

Abstract

Digital media has become a central arena for the formation of political representation in contemporary democratic contexts. Social media functions not only as a channel for disseminating political information but also as a space for producing meaning, identity, and political reality shaped by power relations, symbols, and algorithmic logic. This study aims to analyze how political representation is constructed through digital media and its implications for political identity, public participation, and democratic quality in Indonesia. The research employs a literature review method by examining scholarly journals and academic publications related to political representation, social media, and political communication. The findings indicate that identity politics and populism emerge as dominant representational strategies in digital spaces, effectively fostering affective political loyalty while simultaneously contributing to social polarization and the marginalization of substantive policy discourse. Digital media also accelerates the mediatization of politics, prioritizing symbolic performance and personal imagery over rational deliberation. This study highlights the necessity of critical awareness, media literacy, and ethical political communication to sustain an inclusive and democratic digital public sphere.

Keywords - political representation, digital media, political identity, political communication, democracy

How to Cite : Prisilia, O., Andita, N., Zikri, F. D., & Muchith, C. (2025). Konstruksi Identitas Politik Melalui Representasi Media Digital. Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 2(7), 1296 - 1302. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i7.681>

Copyright ©2025 Ocha Prisilia, Naillah Andita, Fuadi Dwitia Zikri, Chairul Muchith

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Perkembangan media digital dan media sosial telah berkembang pesat dalam peradaban komunikasi, salah satunya semakin berkembangnya interaksi serta komunikasi dalam ranah politik dimana hal tersebut membuat masyarakat dapat lebih leluasa dalam menyampaikan pendapatnya serta memahami realitas dalam dunia politik. Media sosial tidak lagi berfungsi semata sebagai saluran penyampaian informasi, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang informasi, pembentukan opini publik, serta arena pertarungan simbolik antarberbagai kepentingan politik. Politik representasi telah menjadi suatu hal yang krusial untuk menjelaskan bagaimana realitas politik dikonstruksi, ditampilkan, dan dipertukarkan di ruang publik digital. Representasi politik di media sosial tidak bersifat netral atau objektif, melainkan dibentuk oleh relasi kuasa, kepentingan ideologis, serta mekanisme algoritmik platform yang mengatur visibilitas dan sirkulasi pesan politik. Media sosial dengan demikian tidak hanya merefleksikan realitas politik, tetapi turut menciptakan dan membingkai realitas tersebut dalam bentuk simbol, citra, dan narasi tertentu (Adityawan et al., 2025).

Politik representasi menjadi kerangka analitis penting untuk memahami bagaimana realitas politik dibangun di ruang publik digital. Representasi politik tidak merefleksikan realitas sosial secara langsung, melainkan merupakan praktik produksi makna yang berkaitan erat dengan relasi kuasa dan kepentingan ideologis. Media sosial beroperasi sebagai arena pertarungan simbolik yang mempertemukan aktor politik, komunitas daring, dan pengguna individu dalam proses saling memperebutkan definisi isu, identitas, dan legitimasi politik. Media sosial dengan demikian tidak hanya menampilkan realitas politik, tetapi turut membentuk dan membingkainya melalui mekanisme visualisasi, viralitas, dan sirkulasi narasi yang berulang (Adityawan et al., 2025).

Politik representasi di Indonesia semakin menonjol seiring dengan menguatnya praktik politik identitas di media sosial. Identitas agama, etnis, budaya, dan ideologi direpresentasikan sebagai simbol politik yang efektif dalam membangun kedekatan emosional dengan masyarakat luas. Representasi identitas sendiri tidak hanya menonjolkan akan keberagaman sosial namun digunakan secara strategis untuk memperoleh sebuah dukungan dan legitimasi politik. Produksi makna politik berbasis identitas membentuk loyalitas politik yang bersifat afektif, sekaligus berpotensi mendorong polarisasi sosial dan eksklusivitas kelompok tertentu dalam ruang demokrasi (Harsono, 2023).

Realitas sosial dipahami sebagai hasil proses konstruksi yang berlangsung melalui interaksi dan komunikasi antarmanusia, bukan sebagai sesuatu yang hadir secara objektif dan tetap (Berger & Luckmann, 1966 dalam Pamungkas et al., 2024)). Makna mengenai dunia sosial dibentuk, dilembagakan, dan dipertahankan melalui praktik simbolik yang berulang, sehingga apa yang dianggap sebagai “kenyataan” merupakan hasil kesepakatan sosial. Dalam ruang media digital, proses konstruksi ini berlangsung lebih cepat dan melibatkan aktor yang lebih beragam, termasuk media, platform, dan pengguna. Pemikiran tersebut sejalan dengan gagasan representasi yang dikemukakan oleh Hall (1997), yang menempatkan representasi sebagai praktik produksi makna melalui bahasa, simbol, dan citra. Representasi tidak merefleksikan realitas secara langsung, melainkan membentuk cara realitas dipahami. Media menjadi arena penting dalam proses ini karena menentukan bagaimana peristiwa, identitas, dan relasi kuasa ditampilkan dan dimaknai. Dalam politik digital, konstruksi realitas dan representasi saling berkelindan, membentuk pemahaman publik yang dipengaruhi oleh simbol, narasi, dan kepentingan ideologis (Fitrianti et al., 2025).

Media sosial memainkan peran signifikan dalam pembentukan identitas politik generasi muda. Pemuda dan Generasi Z sebagai digital native merupakan kelompok yang aktif dalam memproduksi dan mengonsumsi konten politik di ruang digital. Media sosial menyediakan ruang ekspresi bagi generasi muda untuk menampilkan sikap politik, afiliasi ideologis, serta keterlibatan mereka terhadap isu-isu publik. Identitas politik generasi muda dibangun melalui interaksi simbolik berupa meme, thread informatif, video pendek, dan kampanye visual yang bersifat performatif serta terus mengalami negosiasi makna (Jamil et al., 2025).

Partisipasi politik generasi muda di media sosial berada dalam kerangka kekuasaan platform digital. Algoritma media sosial berfungsi sebagai mekanisme seleksi wacana yang menentukan visibilitas konten politik. Konten yang memicu keterlibatan emosional tinggi memperoleh prioritas distribusi, sehingga narasi politik yang bersifat polaristik dan berbasis identitas lebih dominan. Pola ini mendorong terbentuknya filter bubble dan echo chamber yang membatasi keberagaman perspektif serta memperkuat bias politik pengguna (Adityawan et al., 2025).

Politik representasi di media sosial berkaitan dengan sifat performatif realitas politik. Politik dipahami melalui citra, simbol, dan emosi yang mudah divisualisasikan serta disirkulasikan secara cepat. Representasi identitas di media sosial bersifat cair dan bergantung pada dinamika sosial, kebutuhan akan pengakuan, serta interaksi simbolik di ruang digital. Identitas yang ditonjolkan juga merupakan hasil dari interpretasi yang berkembang di kalangan masyarakat dan bukan refleksi diri yang nyata. (Fitrianti et al., 2025).

Adanya dampak politik representasi di media sosial menunjukkan karakter ambivalen. Media sosial membuka peluang partisipasi politik yang lebih luas dan mendorong keterlibatan publik, khususnya di kalangan generasi muda agar lebih terbuka dalam dunia politik. Representasi politik yang didominasi oleh identitas dan emosi juga berpotensi memicu perilaku politik agresif, seperti ujaran kebencian dan provokasi. Intensitas politik identitas yang tinggi berkorelasi dengan menurunnya kualitas komunikasi politik dan melemahnya kohesi sosial dalam ruang demokrasi digital (Harsono, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun rumusan masalah yang akan dikaji untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana politik representasi dikonstruksi melalui media sosial dan bagaimana representasi tersebut membentuk realitas politik serta identitas politik pengguna di ruang publik digital. Permasalahan lain yang turut dikaji adalah bagaimana relasi kuasa antara aktor politik, pengguna media sosial, dan algoritma platform memengaruhi dominasi narasi politik tertentu serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik politik representasi di media sosial dalam membentuk realitas politik dan identitas politik, khususnya di kalangan generasi muda, serta untuk memahami dampak praktik tersebut terhadap partisipasi politik dan kohesi sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kajian komunikasi politik dan representasi, serta kontribusi praktis bagi pengembangan literasi digital dan penguatan ruang publik digital yang lebih demokratis dan inklusif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Representasi dalam Kajian Ilmu Sosial

Konsep politik representasi berakar pada pemahaman bahwa realitas sosial dan politik tidak hadir secara objektif, melainkan dibentuk melalui proses pemaknaan. Hall (1997) memandang representasi sebagai praktik produksi makna melalui bahasa, simbol, dan citra yang selalu terkait dengan relasi kuasa. Dalam konteks politik, representasi berfungsi sebagai mekanisme untuk membingkai aktor, peristiwa, dan isu tertentu sehingga dapat diterima dan dimaknai publik sesuai kepentingan tertentu. Representasi politik dengan demikian tidak sekadar mencerminkan realitas, tetapi turut membentuk cara masyarakat memahami dan menilai realitas politik tersebut.

Pandangan ini sejalan dengan teori konstruksi sosial realitas yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann (1966), yang menegaskan bahwa realitas sosial merupakan hasil dari proses dialektis antara eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam ranah politik, representasi menjadi medium utama dalam proses tersebut karena melalui simbol dan narasi politiklah makna-makna dilembagakan dan dipertahankan dalam kesadaran publik.

B. Media Digital sebagai Arena Konstruksi Realitas Politik

Perkembangan media digital telah mengubah secara signifikan cara politik direpresentasikan dan dipahami. Media sosial tidak lagi berfungsi semata sebagai saluran informasi, tetapi sebagai ruang

produksi realitas politik yang melibatkan aktor politik, media, platform digital, dan pengguna secara simultan. Media digital mempercepat proses konstruksi realitas sosial melalui intensitas interaksi simbolik dan sirkulasi informasi yang massif (Pamungkas et al., 2024).

Dalam konteks ini, media digital berperan sebagai arena pertarungan simbolik, di mana berbagai narasi politik saling bersaing untuk memperoleh legitimasi dan visibilitas. Algoritma platform turut menentukan dominasi wacana dengan memprioritaskan konten yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi, sehingga representasi politik yang bersifat emosional dan polaristik cenderung lebih menonjol (Adityawan et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa representasi politik di ruang digital sangat dipengaruhi oleh logika teknologi dan kepentingan ekonomi platform.

C. Identitas Politik dan Politik Identitas di Media Sosial

Identitas politik merupakan hasil dari proses sosial yang melibatkan interaksi, simbol, dan pengakuan. Di media sosial, identitas politik dikonstruksi melalui berbagai bentuk representasi visual dan naratif, seperti slogan, meme, video pendek, dan simbol budaya. Politik identitas di media sosial menjadi strategi yang efektif dalam membangun kedekatan emosional antara aktor politik dan pendukungnya.

Representasi identitas agama, etnis, dan ideologi digunakan untuk membentuk loyalitas politik berbasis afeksi, namun berpotensi memperkuat polarisasi sosial. Tumanggor dan Azhar (2025) menunjukkan bahwa politik identitas dalam demokrasi digital sering kali menyederhanakan kompleksitas politik menjadi dikotomi “kita” dan “mereka”. Hal ini berdampak pada melemahnya diskursus rasional dan meningkatnya konflik simbolik di ruang publik digital.

D. Mediatization of Politics dan Performatif Politik Digital

Konsep mediatization of politics menjelaskan bagaimana logika media memengaruhi praktik dan komunikasi politik. Aktor politik semakin menyesuaikan gaya komunikasinya dengan karakter media digital yang menekankan visualisasi, personalisasi, dan dramatisasi. Politik direpresentasikan melalui citra dan performa simbolik yang dirancang untuk menarik perhatian public (Arwansyah et al., 2025).

Dalam konteks ini, substansi kebijakan sering kali tersisih oleh citra personal dan narasi emosional. Representasi politik menjadi bersifat performatif, di mana kehadiran digital dan kemampuan membangun kesan lebih menentukan daripada argumentasi rasional. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa media digital tidak netral, melainkan aktif membentuk orientasi dan persepsi politik masyarakat.

E. Generasi Muda dan Pembentukan Identitas Politik Digital

Generasi muda, khususnya Generasi Z, merupakan kelompok yang paling aktif dalam mengonsumsi dan memproduksi konten politik di media sosial. Media sosial menjadi ruang utama bagi generasi muda untuk mengekspresikan sikap politik dan membangun identitas ideologis. Identitas politik generasi muda terbentuk melalui interaksi simbolik yang bersifat cair dan terus mengalami negosiasi.

Namun, pembentukan identitas tersebut tidak terlepas dari pengaruh algoritma dan echo chamber yang membatasi keberagaman perspektif. Paparan wacana politik yang selektif dapat memperkuat identitas ideologis tertentu sekaligus mengurangi sikap kritis terhadap narasi dominan. Dengan demikian, identitas politik digital generasi muda merupakan hasil interaksi antara agensi individu dan struktur teknologi platform.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah secara sistematis berbagai jurnal ilmiah, artikel akademik, dan publikasi relevan yang membahas politik representasi, media sosial, dan komunikasi politik. Sumber pustaka dipilih berdasarkan keterkaitan topik dan kemutakhiran kajian. Analisis dilakukan secara kritis dan komparatif untuk mengidentifikasi konsep utama, temuan penelitian, serta kecenderungan pemikiran yang berkembang. Hasil kajian literatur

digunakan untuk membangun kerangka konseptual, merumuskan permasalahan penelitian, serta memperkuat landasan teoretis dalam memahami dinamika politik representasi di ruang publik digital.

PEMBAHASAN

Media digital telah menjadi unsur penting dalam pembentukan politik representasi melalui proses produksi makna yang bersifat simbolik, emosional, dan ideologis. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran pesan politik, tetapi berkembang menjadi ruang tempat realitas politik diproduksi dan dinegosiasikan secara berkelanjutan oleh aktor politik, pengguna, serta mekanisme platform digital. Realitas yang tampil di ruang media bukanlah gambaran objektif dari situasi politik, melainkan realitas yang telah melalui proses pembingkaihan tertentu. Melalui framing isu, pemilihan simbol, dan penggunaan bahasa, media berperan aktif dalam membentuk cara publik memahami politik sebagai realitas yang telah dimediasi (Pamungkas et al., 2024).

Politik identitas menempati posisi sentral dalam praktik representasi politik di ruang digital. Simbol agama, budaya, etnis, dan nilai moral digunakan sebagai penanda politik yang kuat dan mudah dikenali oleh khalayak. Narasi identitas dirancang secara sederhana dan emosional untuk membangun keterikatan afektif antara aktor politik dan publik. Strategi ini memungkinkan terbentuknya loyalitas politik yang tidak sepenuhnya bertumpu pada pertimbangan kebijakan, melainkan pada rasa kebersamaan dan perasaan memiliki. Penggunaan simbol identitas secara berulang melalui media sosial memperkuat konstruksi batas sosial antara kelompok yang dianggap sejalan dan kelompok yang diposisikan sebagai pihak lain, sehingga polarisasi sosial semakin menguat (Tumanggor & Azhar, 2025).

Gaya representasi populis juga menjadi ciri menonjol dalam komunikasi politik digital. Aktor politik kerap membangun citra diri sebagai representasi "*rakyat*" yang berhadapan dengan "*elit*" melalui bahasa sehari-hari, narasi penderitaan, dan simbol kedekatan sosial. Representasi ini diperkuat oleh penggunaan visual, gestur, serta performativitas digital yang dirancang untuk menciptakan kesan autentik dan dekat. Karakter media daring yang menonjolkan konflik, dramatisasi, dan personalisasi turut mendorong pergeseran perhatian publik dari substansi kebijakan menuju citra personal dan identitas aktor politik (Gunawan & Paramita, 2024).

Generasi muda menempati peran penting dalam dinamika politik representasi digital. Media sosial menyediakan ruang bagi pemuda untuk mengekspresikan identitas politik melalui meme, video pendek, komentar, dan keterlibatan dalam kampanye daring. Praktik ini memberi peluang bagi pembentukan identitas politik yang lebih terbuka dan partisipatif. Pola konsumsi informasi politik generasi muda sangat dipengaruhi oleh sistem algoritmik yang mengatur visibilitas konten. Algoritma memperkuat narasi tertentu dan membatasi paparan terhadap pandangan yang berbeda, sehingga pengalaman politik yang terbentuk cenderung selektif dan mengarah pada penguatan identitas ideologis tertentu (Fuadi, 2025).

Representasi politik di media digital juga semakin beririsan dengan budaya populer dan hiburan. Pesan politik kerap disampaikan melalui format parodi, satire, dan konten visual yang ringan namun sarat makna ideologis. Gaya sinematografi, simbol visual, dan narasi kompetisi digunakan untuk membangun daya tarik emosional dan personalisasi politik. Realitas politik kemudian direduksi menjadi pertarungan citra dan karakter, sementara kompleksitas kebijakan disederhanakan agar mudah dikonsumsi publik. Pola ini mencerminkan pergeseran komunikasi politik menuju dominasi logika media hiburan yang membingkai politik sebagai tontonan (Prayoga et al., 2025).

Praktik representasi identitas di media sosial juga tampak pada arena di luar politik elektoral. Identitas dikonstruksi melalui branding diri, penggunaan simbol visual, dan narasi personal yang membangun pengakuan sosial. Proses ini melibatkan akumulasi modal simbolik, sosial, dan kultural sebagaimana dijelaskan dalam kerangka Bourdieu. Pola serupa diadopsi oleh aktor politik untuk membangun citra, legitimasi, dan otoritas simbolik di hadapan publik, sehingga identitas politik tampil sebagai hasil konstruksi yang dirancang secara strategis (Yunita & Islam, 2021).

Media digital juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang mempercepat transformasi identitas dan nilai. Representasi identitas agama, budaya, dan lokal sering kali ditampilkan secara selektif dan instrumental untuk kepentingan politik jangka pendek. Praktik ini berpotensi menggeser makna identitas dari refleksi nilai menjadi komoditas politik yang mudah dikonsumsi. Ketika identitas direduksi menjadi simbol yang dangkal, ruang refleksi kritis dan pemaknaan mendalam semakin menyempit (Fauzan et al., 2025).

Persoalan etika dan tanggung jawab turut mewarnai relasi antara media dan politik. Media cenderung mengedepankan sensasionalisme dan keberpihakan tertentu, sementara karakter media sosial memungkinkan setiap pengguna berperan sebagai produsen sekaligus penyebar representasi politik. Ketimpangan literasi media memperbesar risiko penyebaran misinformasi dan distorsi realitas politik. Representasi politik yang beredar tidak selalu melalui proses verifikasi yang memadai, sehingga kualitas informasi politik di ruang publik digital menjadi rentan (Ritonga, 2023).

Dinamika tersebut sejalan dengan pandangan konstruksi sosial yang memposisikan realitas sebagai hasil interaksi simbolik yang berlangsung secara terus-menerus. Media digital memperluas dan mempercepat proses konstruksi realitas politik melalui interaksi antara media massa dan media sosial, menciptakan realitas hibrida yang memadukan narasi global dan lokal. Perpaduan simbol tradisional dengan gaya komunikasi modern menunjukkan bagaimana representasi politik dibentuk melalui negosiasi makna yang kompleks (Pamungkas et al., 2024).

Tekanan logika media digital juga mendorong aktor politik untuk menyesuaikan cara merepresentasikan diri. Citra politik dibangun secara personal, emosional, dan berbasis storytelling guna menciptakan kedekatan dengan publik. Strategi ini efektif dalam membangun daya tarik politik, sekaligus berpotensi mengaburkan substansi kebijakan dan akuntabilitas. Representasi politik bergerak menjauh dari praktik deliberatif menuju performativitas simbolik yang menekankan kesan dan emosi (Arwansyah et al., 2025).

Hasil analisis keseluruhan dalam pembahasan menunjukkan bahwa politik representasi di media digital merupakan proses yang melibatkan relasi kuasa, simbol, identitas, dan teknologi. Media sosial membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas dan menghadirkan bentuk representasi alternatif, sekaligus memperkuat polarisasi dan dominasi narasi tertentu. Politik identitas, populisme, dan mediatization of politics menjadi pola utama dalam representasi politik digital di Indonesia. Tanpa penguatan literasi media dan etika komunikasi, praktik representasi ini berpotensi melemahkan kualitas demokrasi dan memperdalam fragmentasi sosial.

Uraian ini menegaskan perlunya pendekatan kritis terhadap media digital sebagai arena politik representasi. Representasi politik perlu dipahami sebagai praktik kekuasaan simbolik yang membentuk realitas, identitas, dan arah demokrasi. Upaya penguatan literasi digital, regulasi platform yang adil, serta pengembangan komunikasi politik yang inklusif menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan demokrasi di ruang digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa media digital memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk politik representasi melalui konstruksi simbol, narasi, dan identitas yang beredar di ruang publik daring. Media sosial tidak hanya menjadi sarana penyampaian pesan politik, tetapi juga arena produksi makna yang dipengaruhi oleh relasi kuasa antara aktor politik, pengguna, dan logika algoritmik platform. Representasi politik yang muncul cenderung menekankan aspek visual, emosional, dan identitas, sehingga membentuk realitas politik yang bersifat selektif dan terfragmentasi. Hasil kajian literatur mengungkap bahwa politik identitas dan populisme menjadi strategi representasi dominan dalam komunikasi politik digital di Indonesia. Strategi ini efektif dalam membangun loyalitas politik berbasis afeksi, namun berpotensi menimbulkan polarisasi sosial, eksklusivitas kelompok tertentu, serta melemahkan kualitas deliberasi demokratis. Media digital juga mendorong mediatization of politics, di mana logika popularitas dan performativitas lebih diutamakan

dibandingkan substansi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kritis terhadap praktik politik representasi di media digital. Penguatan literasi media, etika komunikasi politik, serta kesadaran publik terhadap mekanisme konstruksi realitas menjadi hal yang penting untuk menjaga ruang publik digital tetap inklusif dan demokratis. Dengan pengelolaan yang bijak, media digital berpotensi menjadi sarana representasi politik yang lebih adil, reflektif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityawan, J., Reyhan, I. E., & Christianto, A. (2025). Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Sosial: Studi Perilaku Pemilih Di Era Informasi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1220–1227. <https://doi.org/10.37481/jmh.V5i3.1472>
- Alfan Jamil, Fatkurohman Nur Rangga, Rama Dwi Rendra, & Thifli Ahmad. (2025). Media Sosial Sebagai Sarana Pembentukan Identitas Politik Pemuda. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 244–253. <https://doi.org/10.62383/Humif.V2i3.2023>
- Arwansyah, O. D., Wiflihani, W., Suroso, P., Sigalingging, H., & Bangun, D. P. (2025). Politik Dalam Bingkai Media: Studi Mediatization Of Politics Terhadap Konten Sosial Media Dedi Mulyadi. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)*, 8(1), 190–197. <https://doi.org/10.34007/Jehss.V8i1.2720>
- Fauzan, M., Purwanto, E., Jupri, H. D. N., & Dewi, P. S. (2025). Media Sebagai Agen Perubahan Komunitas Di Era Teknologi Digital. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 2(4), 15. <https://doi.org/10.47134/jbkd.V2i4.4369>
- Fitrianti, R., Hanaf, A. A., Sosial, I., & Bangsa, U. B. (2025). Representasi Identitas Remaja Melalui Budaya Tren Di Media Sosial Identitas, Namun Masih Terbatas Yang Secara Khusus Mengkaji Hubungan Antara Budaya Tren. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 283–297.
- Fuadi, M. (2025). Pembentukan Identitas Politik-Islam Di Dunia Digital: Studi Etnografi Akun Dakwah Politik Di MEDIA Sosial. *Cigarskruie: Journal Of Educational And Islamic Research*, 2(1), 135–153. <https://doi.org/10.65190/636439>
- Gunawan, K. A., & Paramita, S. (2024). Konstruksi Aspek-Aspek Populisme Aktor Politik Pada Media Online Melalui Perspektif Identitas Sosial. *Koneksi*, 8(1), 132–141. <https://doi.org/10.24912/Kn.V8i1.27601>
- Harsono, H. (2023). Politik Identitas Dan Partisipasi Politik Di Media Sosial: Analisis Model Struktural Pada Generasi Z Di Kota Malang. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 166–187.
- Pamungkas, Y. C., Moefad, A. M., & Purnomo, R. (2024). Konstruksi Realitas Sosial Di Indonesia Dalam Peran Media Dan Identitas Budaya Di Era Globalisasi. *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(4), 28–36. <https://doi.org/10.37329/Metta.V4i4.3737>
- Prayoga, B., Wiryany, D., & Meltareza, R. (2025). Representasi Komunikasi Politik Pada Video Epic Rap Battle Of Presidency 2024 : Analisis Semiotika John Fiske. *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(01), 66.
- Tumanggor, A. A., & Azhar, T. (2025). Strategi Politik Identitas Dalam Demokrasi Indonesia. *Jimik*, 6(2), 1417–1426.
- Yunita, L., & Islam, M. A. (2021). Representasi Kesenimanian Melalui Media Sosial Sebagai Konstruksi Identitas: Studi Kasus Akun Instagram. *Sakala Jurnal Seni Rupa Murni*, 2(1), 78–91.